



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **YUDI SUKMAYADI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN BISNIS**
3. NHK : **633413**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.741.150.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/245 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 918.750.000
2. Tanah Seluas 2.405 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 96.200.000
3. Tanah Seluas 2.405 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 96.200.000
4. Tanah Seluas 35 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah Seluas 44 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
7. Tanah Seluas 3.217 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
8. Tanah Seluas 1.680 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 341.350.000**

1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000



2. MOTOR, YAMAHA B3B A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.350.000
3. MOBIL, DAIHATSU R MT DELUXE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	54.821.826
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.137.321.826
III. HUTANG	Rp.	821.628.864
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.315.692.962

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.